



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10121-10131

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Opini Audit, TLHP, SPIP, dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia

Alya Anty Shafira

Akuntansi, Universitas Lampung, Indonesia

[alyaantyshafira@gmail.com](mailto:alyaantyshafira@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2023. Tingkat korupsi pada pemerintah daerah masih menjadi permasalahan serius yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta beberapa situs resmi pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, TLHP, dan SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi yang mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas opini audit, semakin efektif tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, serta semakin optimal penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, maka tingkat korupsi pada pemerintah daerah cenderung menurun. Sementara itu, kapabilitas APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi yang menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas APIP belum secara langsung mampu menekan praktik korupsi di pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan guna meminimalkan tingkat korupsi.*

*Kata kunci: Tingkat Korupsi; Opini Audit; TLHP; SPIP; Kapabilitas APIP*

### 1. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Berdasarkan laporan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintahan daerah seringkali menduduki posisi tertinggi dalam jumlah kasus korupsi, terutama pada pemerintah kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan besar dalam pembangunan daerah dan menjadi penyebab utama menurunnya demokrasi. Korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan dan aset akibat lemahnya sistem pengawasan menimbulkan indikasi korupsi serta pungutan liar yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Rizki, 2023). Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif menjadi krusial dalam mencegah dan memberantas korupsi di tingkat daerah. Salah satu mekanisme penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah melalui audit eksternal oleh BPK. Meskipun demikian, tren perolehan opini WTP terus meningkat setiap tahun yang memunculkan kesan bahwa pemerintah daerah hampir sepenuhnya bebas dari praktik korupsi. Namun, data justru menunjukkan hal yang bertolak belakang. Kasus ini menjadi sebuah pertanyaan mengenai relevansi dan efektivitas opini audit dalam mencerminkan integritas tata kelola keuangan daerah.

Lebih lanjut, pada IHPS II 2023, terungkap adanya peningkatan jumlah permasalahan ketidakpatuhan pada hasil pemeriksaan pemerintah daerah dan BUMD. Peningkatan ini mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi rekomendasi audit yang dapat menjadi celah bagi praktik korupsi untuk berkembang. Kondisi

---

Pengaruh Opini Audit, TLHP, SPIP, dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia

tersebut menunjukkan bahwa efektivitas TLHP sangat bergantung pada sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh entitas pemerintahan.

Dalam hal ini, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diawasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan yang sangat signifikan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Namun, implementasi SPIP di banyak daerah masih belum optimal dan banyak APIP di daerah yang masih kurang terlatih dan memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini mengakibatkan pengawasan yang tidak maksimal dan berpotensi meningkatkan risiko korupsi. Selain itu, beberapa studi sebelumnya juga masih menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh opini audit, TLHP, SPIP, dan kapabilitas APIP terhadap tingkat korupsi di Indonesia

### **Teori Keagenan**

Jensen & Meckling (1976) dalam Muhandimansyah & Arza (2025) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan sebuah struktur konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah adalah sebagai agen bagi masyarakat (prinsipal). Dalam teori ini, terdapat masalah keagenan yang timbul akibat adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, yaitu moral hazard dan adverse selection. Kedua permasalahan ini timbul akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dalam mencapai tujuannya, sehingga keputusan yang dibuat mungkin akan merugikan salah satu pihak atau dikenal dengan istilah *asymmetric information*

### **Opini Audit**

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan lembaga atau perusahaan tempat auditor melakukan audit (Agoes, 2016). Opini audit tidak hanya merefleksikan hasil akhir dari proses audit, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang diperiksa. Hasil opini audit yang menyatakan kewajaran laporan keuangan mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (Bakade & Paramitalaksmi, 2024).

### **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Rekomendasi dari BPK berfungsi sebagai masukan untuk memperbaiki pengelolaan dan penyajian laporan keuangan (Muhandimansyah & Arza, 2025). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) akan membantu entitas atau pemerintah daerah dalam mengurangi pelanggaran yang berulang. Kurniawati & Pratama (2021) menyatakan bahwa perbaikan setelah proses audit sesuai dengan rekomendasi BPK merupakan bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, terutama penyalahgunaan keuangan negara, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan tingkat korupsi.

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

SPIP adalah sebuah proses yang menyatu dalam setiap tindakan dan aktivitas yang secara berkelanjutan dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan memberikan keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran SPIP dilakukan dengan menggunakan skor maturitas untuk menilai efektivitas pengendalian internal.

### **Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

Pengawasan kerja yang efektif secara signifikan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara, sehingga kinerja optimal tercapai dan tata kelola pemerintahan bebas dari praktik korupsi (Ibrahim et al., 2024). Pengawasan pada pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, melalui instansi pengawas (Inspektorat). Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kemampuan APIP diukur melalui tingkat kapabilitasnya.

## **Tingkat Korupsi**

Lembaga Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan tidak pantas dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau orang terdekat dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Tingkat korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara efisien dan akuntabel (OECD, 2017).

## **Hipotesis Penelitian**

### **Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi**

Berdasarkan teori keagenan, opini audit berperan sebagai mekanisme monitoring eksternal yang membantu masyarakat sebagai prinsipal untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah (agen). Semakin baik opini audit yang diperoleh, maka tingkat korupsi di pemerintah daerah diasumsikan akan menurun, dimana hal ini menunjukkan hubungan yang bersifat negatif (Wicaksono & Prabowo, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nurfaidah & Novita (2022) yang menyatakan bahwa semakin sedikit adanya kasus korupsi di pemerintah daerah, maka tingkatan opini audit yang akan didapat semakin tinggi, maka diperoleh:

H1: Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

### **Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terhadap Tingkat Korupsi**

Berdasarkan teori keagenan, TLHP menjadi mekanisme dalam mendorong pemerintah sebagai agen untuk bertindak sesuai dengan perintah masyarakat. Penelitian oleh Liu & Lin (2012) dalam Kurniawati & Pratama (2021) dan Ruselvi et al. (2020) menyimpulkan bahwa TLHP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, dimana semakin baik tingkat penyelesaian TLHP, maka semakin rendah tingkat korupsi karena sistem pengelolaan diperbaiki dan risiko kerugian negara diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, sehingga diperoleh:

H2: TLHP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Tingkat Korupsi**

Berdasarkan teori keagenan, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang memperkuat posisi masyarakat sebagai prinsipal dalam memantau kinerja dan tindakan pemerintah daerah sebagai agen. Semakin tinggi kualitas penerapan SPIP, maka kemungkinan terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah semakin rendah, sehingga hubungan antara SPIP dan tingkat korupsi bersifat negatif (Nurfaidah & Novita, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahayu & Fidiana (2018), Aminah et al. (2022), serta Azizah & Erinos (2022) yang menyatakan bahwa penerapan SPIP yang kuat penting untuk menurunkan tingkat korupsi. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh:

H3: SPIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

### **Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Tingkat Korupsi**

Sama halnya dengan SPIP, APIP merupakan bagian dari sistem pengendalian internal. Dalam perspektif teori keagenan, APIP bertugas mengawasi kinerja agen agar tetap sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori ini sejalan dengan penelitian Sari et al. (2024) serta Fuadi & Mabrur (2021) yang menyatakan bahwa kapabilitas APIP berperan signifikan dalam menekan praktik korupsi di sektor pemerintah daerah dengan hubungan negatif. Kemudian, penelitian Marnani et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kemampuan APIP sangat penting dalam memberantas korupsi karena fungsi audit internal yang matang dapat meningkatkan pencegahan, deteksi, dan penyelidikan tindak pidana korupsi, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan kepatuhan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, diperoleh hipotesis:

H4: Kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi

## 2. Metode Penelitian

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sampel selama dua tahun, yaitu 2022-2023 pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai informasi, seperti data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta penilaian maturitas dan kapabilitas oleh BPKP.

### Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran	Dasar Pengukuran
Opini Audit (X1)	Wajar Tanpa Pengecualian diberikan skor 4 Wajar Dengan Pengecualian diberikan skor 3 Tidak Wajar diberikan skor 2 Tidak Memberikan Pendapat diberikan skor 1	Warkini <i>et al.</i> (2021) serta Ratmono & Saleh (2017)
TLHP (X2)	$TLHP = \frac{Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi}{Total Rekomendasi}$	Baldan & Haryanto (2024)
SPIP (X3)	Level 0 diberikan skor 0 (Belum Ada) Level 1 diberikan skor 1 (Rintisan) Level 2 diberikan skor 2 (Berkembang) Level 3 diberikan skor 3 (Terdefinisi) Level 4 diberikan skor 4 (Terkelola dan Terukur) Level 5 diberikan skor 5 (Optimum)	PP Nomor 60 Tahun 2008 serta Perdana & Prasetyo (2023)
Kapabilitas APIP (X4)	Level 1 diberikan skor 1 ( <i>Initial</i> ) Level 2 diberikan skor 2 ( <i>Structured</i> ) Level 3 diberikan skor 3 ( <i>Delivered</i> ) Level 4 diberikan skor 4 ( <i>Institutionalized</i> ) Level 5 diberikan skor 5 ( <i>Optimized</i> )	BPKP RI Nomor 8 Tahun 2021 serta Fuadi & Mabur (2021)
Tingkat Korupsi (Y)	$Tingkat Korupsi = \frac{Total Kerugian Negara}{Total Anggaran}$	Erliani <i>et al.</i> (2025)

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dalam menggambarkan sampel yang diteliti. Selain itu, regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis tingkat keterkaitan antarvariabel dengan melakukan estimasi besarnya perubahan pada variabel X yang berdampak pada variabel Y. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS 25.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Deskripsi Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan resmi BPK, BPKP, dan beberapa situs resmi pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2022-2023. Populasi penelitian mencakup 514 pemerintah daerah yang kemudian dipilih secara purposive sampling berdasarkan ketersediaan data lengkap.

**Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian**

Keterangan	Total Sampel
Merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia	514
Menyediakan data penelitian berupa LKPD, tingkat maturitas SPIP, dan kapabilitas APIP secara berturut-turut pada tahun 2022-2023	(6)
Total pemerintah daerah kabupaten/kota lolos kriteria	508
Total tahun penelitian	2
Total data penelitian (508 x 2)	1.016
Total data <i>outlier (extreme)</i>	(192)
Total data yang digunakan untuk analisis statistik deskriptif	824

### Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif menggambarkan setiap variabel independen dan dependen, sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	824	3.00	4.00	3.9466	.22496
TLHP	824	.0000	1.0000	.551387	.3520602
SPIP	824	1.00	3.00	2.6129	.57648
Kapabilitas APIP	824	1.00	3.00	2.4260	.58690
Tingkat Korupsi	824	.0000	4.0786	1.178910	.8991600
Valid N (listwise)	824				

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Data dapat dikatakan berdistribusi normal dan tidak mengalami masalah normalitas apabila diperoleh nilai signifikansi  $> 0,05$ , sehingga uji hipotesis dapat dilakukan.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	824
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	.000 <sup>d</sup>

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

Data mengalami masalah normalitas dengan distribusi yang tidak normal yang dilihat dengan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Oleh karena itu, dilakukan transformasi data pada variabel dependen (Y) dengan menggunakan akar kuadrat (SQRT).

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas setelah Transformasi Y One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
N	824
Asymp. Sig. (2-tailed)	.056 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	.393 <sup>d</sup>

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5396>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hasil uji normalitas yang ditampilkan dalam Tabel 4.4 terhadap 824 sampel kabupaten/kota dengan metode Monte Carlo dan transformasi variabel dependen menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,393, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Ambang batas uji ini adalah Tolerance > 0,1 dan VIF < 10.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Opini Audit	.947	1.056
	TLHP	.941	1.063
	SPIP	.715	1.399
	Kapabilitas APIP	.772	1.295

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

Nilai Tolerance untuk seluruh variabel independen pada penelitian ini berada di atas 0,1, diikuti dengan nilai VIF yang secara signifikan berada di bawah 10, menyiratkan tidak adanya isu multikolinearitas yang berpengaruh terhadap variabel.

### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi ketika variasi residual tidak konstan pada seluruh nilai variabel independen yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengujian signifikansi. Dalam menguji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.113	.138		.821	.412
	Opini Audit	.078	.036	.078	2.192	.209
	TLHP	-.021	.023	-.034	-.941	.347
	SPIP	-.027	.016	-.070	-1.700	.089
	Kapabilitas APIP	-.005	.015	-.013	-.320	.749

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

Seluruh nilai signifikansi melebihi 0,05 yang artinya tidak ditemukan keterkaitan yang bermakna antara variabel independen dengan varians residual di model tersebut, sehingga model regresi penelitian ini terbebas dari isu heteroskedastisitas yang berpengaruh.

### Uji Autikorelasi

Data dinilai tidak mengalami permasalahan autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak pada rentang antara -2 sampai +2.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.366 <sup>a</sup>	.134	.130	.39752	1.306

a. Predictors: (Constant), Kapabilitas APIP, TLHP, Opini Audit, SPIP

b. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai Durbin-Watson senilai 1,306 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada penelitian ini dikarenakan memenuhi syarat berada pada rentang mendekati angka 2.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau dampak dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.996	.245		12.213	.000
	Opini Audit	-.405	.063	-.214	-6.392	.000
	TLHP	-.175	.041	-.145	-4.325	.000
	SPIP	-.145	.028	-.196	-5.104	.000
	Kapabilitas APIP	.031	.027	.043	1.154	.249

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut, dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = 2,996 - 0,405X_1 - 0,175X_2 - 0,145X_3 + 0,31X_4 + e$$

### Pengujian Hipotesis

#### *Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)*

Kriteria dalam uji-t ini adalah ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen tersebut dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Nilai signifikansi hasil uji-t dapat dilihat pada Tabel 4.8. Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh bahwa opini audit, TLHP, dan SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi yang menandakan bahwa H1, H2, serta H3 diterima. Adapun kapabilitas APIP tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kapabilitas APIP berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi ditolak.

#### *Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)*

Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi F berada di bawah 0,05.

**Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.054	4	5.014	31.727	.000 <sup>b</sup>
	Residual	129.422	819	.158		
	Total	149.477	823			

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

b. Predictors: (Constant), Kapabilitas APIP, TLHP, Opini Audit, SPIP

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji-F pada Tabel 4.9, diperoleh nilai F sebesar 31,727 yang merepresentasikan perbandingan antara variasi data yang dapat dijelaskan oleh model regresi terhadap variasi yang tidak dapat dijelaskan. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variasi pada tingkat korupsi.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variabilitas pada variabel dependen. Nilai  $R^2$  berada dalam rentang 0 hingga 1, dimana nilai 0 menandakan bahwa model tidak mampu menjelaskan variasi dalam data, sebaliknya nilai 1 mengindikasikan bahwa model berhasil menjelaskan seluruh variasi yang terdapat di dalamnya.

**Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.366 <sup>a</sup>	.134	.130	.39752	

a. Predictors: (Constant), Kapabilitas APIP, TLHP, Opini Audit, SPIP

b. Dependent Variable: Tingkat Korupsi

Sumber: Data yang diolah SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada Tabel 4.10, diperoleh nilai R sebesar 0,366 yang lebih mendekati nilai 0 mengindikasikan adanya keterkaitan yang tidak terlalu kuat antara variabel independen opini audit, TLHP, SPIP, dan kapabilitas APIP terhadap tingkat korupsi. Nilai  $R^2$  sebesar 0,134 menunjukkan bahwa 13,4% variasi tingkat korupsi mampu dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 86,6% sisanya dipengaruhi oleh elemen-elemen lain di luar model.

## **Pembahasan**

### ***Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia***

Opini audit merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi -0,405, yang mengindikasikan bahwa semakin baik opini audit yang diperoleh, semakin rendah potensi terjadinya korupsi. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menempatkan opini audit sebagai mekanisme pengawasan eksternal dalam mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Kualitas audit yang tinggi mampu menekan kecurangan dan praktik koruptif melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (Furqan & Din, 2019; Hikam *et al.*, 2020; Wicaksono & Prabowo, 2022) Meskipun opini WTP tidak menjamin bebas dari korupsi, opini audit tetap berperan penting sebagai indikator awal risiko korupsi dan instrumen evaluasi berkelanjutan yang perlu diikuti dengan penguatan pengawasan pasca pemberian opini.

***Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia***

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) mencerminkan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam memperbaiki kesalahan pengelolaan dan pelaporan keuangan publik, dimana nilai audit tidak hanya terletak pada rekomendasi yang diberikan, tetapi pada efektivitas implementasinya (Ruselvi *et al.*, 2020; Budiman & Amyar, 2021). Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa TLHP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi -0,175, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK, semakin rendah potensi terjadinya korupsi. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menempatkan TLHP sebagai mekanisme pengawasan eksternal dalam mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa peningkatan tindak lanjut rekomendasi audit berkontribusi pada penurunan korupsi serta perbaikan kualitas tata kelola keuangan daerah (Ruselvi *et al.*, 2020; Kurniawati & Pratama, 2021; Angela *et al.*, 2023). Oleh karena itu, TLHP dapat dipandang sebagai jembatan antara hasil audit dan perbaikan berkelanjutan tata kelola pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi.

***Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia***

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan memberikan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan (PP No. 60 Tahun 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi -0,145, yang mengindikasikan bahwa semakin baik pelaksanaan SPIP, semakin rendah potensi terjadinya korupsi. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menempatkan SPIP sebagai instrumen pengendalian untuk menekan konflik kepentingan dan moral hazard antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Konsistensi hasil ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif mampu menekan kecurangan dan penyimpangan keuangan (Mulyadi, 2016; Fadli *et al.*, 2023; Faisol *et al.*, 2023). Namun demikian, masih ditemukannya kelemahan SPIP pada pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam IHPS I Tahun 2024 menunjukkan bahwa penguatan implementasi SPIP, peningkatan kompetensi pengawas internal, dan penegakan tindak lanjut pengendalian tetap diperlukan agar SPIP berfungsi optimal sebagai instrumen pencegahan korupsi, bukan sekadar perangkat administratif (Rini & Damiani, 2017; Permana & Bujana, 2024).

***Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia***

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam deteksi dan pencegahan korupsi, dimana auditor internal dinilai lebih mampu mendeteksi kecurangan dibandingkan auditor eksternal (ACFE, 2022; Permana & Bujana, 2024). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia, dengan nilai signifikansi 0,249 dan koefisien regresi positif sebesar 0,31, sehingga hipotesis ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapabilitas APIP belum mampu secara efektif menekan praktik korupsi, yang dalam perspektif teori keagenan disebabkan oleh keterbatasan independensi APIP akibat posisinya yang berada di bawah kepala daerah, sehingga melemahkan fungsi pengawasan terhadap agen (Jensen & Meckling, 1976; Nathan *et al.*, 2022). Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa audit internal pemerintah belum berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat korupsi meskipun tingkat kapabilitas dinilai memadai (Rahmasari & Setiawan, 2021; Aulia & Maksun, 2022; Rosidi *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penguatan independensi, sumber daya, dan koordinasi APIP dengan aparat penegak hukum menjadi krusial agar kapabilitas APIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkontribusi nyata dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa “Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi” ditolak.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Opini Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia periode 2022–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa opini audit, TLHP, dan SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, yang mengindikasikan bahwa kualitas pelaporan keuangan, efektivitas tindak lanjut rekomendasi audit, serta kuatnya sistem pengendalian internal berperan penting dalam menekan penyimpangan dan praktik koruptif. Sebaliknya, kapabilitas APIP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, yang menunjukkan bahwa keberadaan dan peningkatan kapabilitas APIP belum secara langsung berdampak pada penurunan korupsi di pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan eksternal dan internal yang efektif serta implementatif dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah.

#### Referensi

1. Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Buku 1) (Edisi ke-5)*. Salemba Empat.
2. Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to The Nations*.
3. Aulia, S., & Maksun, I. R. (2022). Reformasi Kelembagaan Unit Pengawas Internal: Mengatasi Desentralisasi Korupsi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 008(01), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.1>
4. Azizah, N., & Erinos. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Asimetri Informasi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 674–685. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.494>
5. Bakade, S., & Paramitalaksmi, R. (2024). PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN ATAS KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP FRAUD BUMN PERIODE 2020-2023. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(3), 2496–2510. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4780>
6. Baldan, K., & Haryanto. (2024). PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DAERAH DI JAWA TENGAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2017-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/46169>
7. Bandiyono, A. (2021). Good Government Governance in The Internal Control System and Audit Opinion. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 120–137. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i1.728>
8. Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Pouloupoulos, J. (2024). Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations: A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development. *Economies*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/economies12040078>
9. Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1)(1), 57–74. <https://www.jstor.org/stable/258191>
10. Fadli, M., Zahra, F., & Bakri, M. I. (2023). Detection of Accounting Fraud in Local Governments for Sustainable Regional Development: The Role of Morality, Internal Control Systems and Compliance of Accounting Standards. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research*, 33–41. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-172-2\\_7](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-172-2_7)
11. Faisol, Haryadi, B., Musyarofah, S., & Iswahyudi, A. P. (2023). Effectiveness of the Internal Control System Against Fraud Tendencies “Meta-Analysis Study.” *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), 327–339. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i2.308>
12. Fitri, A., & Hanif. (2024). Internal Control System for Government Agencies. *KnE Social Sciences*, 2024, 119–125. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16239>
13. Fuadi, I., & Mabru, A. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>
14. Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
15. Hikam, S., Yunieta, Y., & Rizkarmen, M. (2020). Audit Opinion and Fraud in Local Government: Case of Indonesia Audit Opinion and Fraud in Local Government: Case of Indonesia. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(3), 107–118. <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.12108>
16. Ibrahim, F. E., Sukmana, O., & Wahyudi, W. (2024). The Effect of Work Supervision on Employee Performance at The Secretariat of The Riau Provincial DPRD With Work Discipline as an Intervening. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 3(5), 1018–1036. <https://doi.org/10.46799/ajesh.v3i5.316>
17. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://papers.ssrn.com/abstract=94043>
18. Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
19. Marnani, C. S., Saputro, G. E., & Muliandiyah, P. (2023). The Role of the Government’s Internal Supervisory Apparatus in Preventing Corruption In Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 39(2), 219–225. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v39.2.5443>
20. Muhandimansyah, & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi: Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 7(1), 95–106. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.1966>
21. Nathan, L., Aswar, K., Jumansyah, Mulyani, S., Hardi, & Nasir, A. (2022). The Moderating Role of Natural Resources Between Fiscal Decentralization, Government Internal Audit, Law Enforcement and Corruption: Evidence from Indonesian Local Government. *Contemporary Economics*, 16(4), 397–409. <https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.490>
22. Nurfaidah, & Novita. (2022). Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Spi Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v27i1.308>
23. Perdana, A. I., & Prasetyo, T. J. (2023). Apakah Opini Audit, Pengendalian Internal, Dan Apbd Memengaruhi Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 74–89. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i2.266>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5396>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

24. Permana, K., Chresna, C., & Bujana, A. (2024). Integritas: Jurnal Antikorupsi Examining the efforts of government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in enhancing bureaucratic reform, organizational integrity, and risk management: An efficiency analysis. 10(1), 107–122.
25. Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016>
26. Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37–50. <https://doi.org/10.15294/jda.v13i1.29137>
27. Ratmono, D., & Saleh, L. O. I. H. (2017). Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintahan pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
28. Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
29. Rosidi, Baridwan, Z., & Putri, I. L. A. (2023). APAKAH AUDIT INTERNAL BERPERAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 138–148. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.10>
30. Ruselvi, S. A., Nurbaiti, A., & Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2659–2668.
31. Sari, F. L., Gamayuni, R. R., Dewi, F. G., & Metalia, M. (2024). The Effect of the Government Internal Control System on Corruption Potential with Accountability as an Intervening Variable (Study on Regency/City Governments in Indonesia). *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(2), 341–357. <https://doi.org/10.61132/ijema.v1i2.117>
32. Warkini, Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2020). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>
33. Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>